



STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI KEDELAI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Bayu Rizky Pratama[✉], Hardiansyah Nur Sahaya

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : Maret 2014; Accepted: April 2014; Published: September 2014

Abstract

In the era of globalization, food sustainability is one of the main sectors that has an important role in economic development in Indonesia. The development of agricultural sector needs to be implemented. It is for advancing the agriculture, so that, both production output and farmer welfare will increase. Soybean is one of the leading agricultural commodities in Central Java province. The purpose of this research is to analyze the strategy and program criteria that can be done to develop the soybean farming in Central Java. An Analysis Hierarchy Process (AHP) was applied. The sampling technique was done by simple random sampling consisting of 12 people. The results show that the development of soybean farming in Central Java province comprises of several prioritized program criterias. The first priority is the criteria of cultivation, 0.537. The second criteria is input and its score is 0.220. The third criteria is institutions, 0.110. The fourth criteria is post-harvest, 0.058. The fifth criteria is marketing, 0.040.

Keywords: development of soybean farming, food security, analysis hierarchy process

Abstrak

Pada era globalisasi salah satu isu utamanya adalah ketahanan pangan maka sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengembangan sektor pertanian perlu dilaksanakan guna memajukan sektor pertanian baik berupa peningkatan output produksi dan kualitas serta mampu mengangkat kesejahteraan petani. Kedelai merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi dan kriteria program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha tani kedelai di Provinsi Jawa Tengah yang berdampak kepada terwujudnya ketahanan pangan Indonesia berdasarkan pendekatan Analysis Hierarchy Process. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling yang terdiri dari 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah tersusun atas beberapa kriteria program yang di prioritaskan dalam pembentukannya yaitu pertama kriteria budidaya (nilai bobot 0,537), kedua kriteria input (nilai bobot 0,220), ketiga kriteria lembaga (nilai bobot 0,110), keempat kriteria pasca panen (nilai bobot 0,058), dan kelima kriteria pemasaran (nilai bobot 0,040).

Kata Kunci: pengembangan usahatani kedelai, ketahanan pangan nasional, analysis hierarchy process

How to Cite: Pratama, Bayu Rizky dan Hardiansyah Nur Sahaya (2014). Strategi Pengembangan Usahatani Kedelai Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia, *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 7 (2): 100-202 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2014 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pengembangan agribisnis palawija memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan. Hussain et al (2009). Pengembangannya akan mendukung program diversifikasi pangan dan pertanian mengingat keberadaan palawija dalam pola pertanaman diyakini mampu memantapkan tingkat stabilisasi dan kontinuitas pendapatan rumah tangga petani. Diversifikasi usaha tani dengan mengikutsertakan palawija juga diyakini mampu menjamin keberlanjutan usahatani padi di lahan sawah.

Kebutuhan kedelai di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk bahan pangan maupun industri seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, dan lain sebagainya. Kebutuhan kedelai di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 2.647.151 meningkat menjadi 2.946.211 pada tahun 2012.

Selain sebagai sumber protein, kedelai juga bermanfaat untuk menurunkan kandungan kolestrol yang dapat mencegah penyakit jantung. Kedelai dapat pula berfungsi sebagai antioksidan dan mencegah penyakit kanker (Baliwati, et al 2004). Oleh karena itu, kebutuhan kedelai diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan makanan bergizi. Secara empiris peningkatan konsumsi kedelai di Indonesia yang cukup tinggi tidak di dukung dengan produksi yang cukup, menyebabkan terjadinya defisit. Selama ini pemerintah Indonesia cenderung memilih impor daripada meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri. Volume impor kedelai selalu lebih besar daripada volume produksi kedelai di dalam negeri padahal kedelai merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian telah menetapkan program “empat sukses” pembangunan pertanian lima tahun mendatang (2010-2014), yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan swasembada kedelai dengan produksi target kedelai meningkat sebesar 20,05% per tahun, sehingga produksi kedelai pada tahun 2014 dapat mencapai 2,7 juta ton (Tabel 2).

Akan tetapi program tersebut dapat dikatakan gagal hal ini dikarenakan sampai dengan tahun 2012 target pemerintah untuk memproduksi kedelai 1,9 juta ton tidak terealisasi karena pada tahun 2012 produksi kedelai hanya sebesar 851 ribu ton Sehingga pemerintah harus kembali mengimport kedelai sebesar 2,1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam mencapai sasaran produksi pada tahun 2012

Tabel 1. Produksi, Impor, Ekspor dan Kebutuhan Dalam Negeri Terhadap Kedelai (ton)

Tahun	Produksi	Impor	Ekspor	Kebutuhan Dalam Negeri
2010	907.031	1.740.505	398	2.647.151
2011	851.286	1.911.987	523	2.489.182
2012	851.647	2.128.763	33.950	2.946.211

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah dari BKP), 2013

Tabel 2. Target Produksi Komoditi Tanaman Pangan di Indonesia (ribu ton)

Komoditi	Tahun					Rata-rata pertumbuhan
	2010	2011	2012	2013	2014	
Padi	66.680	70.5999	74.129	77.835	81.727	5,22
Jagung	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000	10,02
Kedelai	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700	20,05

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014

Tabel 3. Tiga Provinsi Terbesar Penghasil Kedelai di Indonesia

Provinsi	Luas Panen (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ku/ha)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Jawa Timur	252.815	220.815	366.999	361.986	14,52	16,39
Jawa Tengah	81.988	97.112	112.273	152.416	13,69	15,69
Nusa Tenggara Barat	75.042	62.888	88.099	74.156	11,74	11,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah perlu untuk merencanakan kebijakan dan programnya dengan lebih baik lagi. Dalam mewujudkan swasembada kedelai yang berdampak kepada terwujudnya ketahanan pangan nasional maka orientasi kebijakan, kriteria program, dan pembangunan harus ditujukan pada revitalisasi sektor pertanian di berbagai Provinsi salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah.

Sektor pertanian merupakan sektor yang potensial dalam mendorong perekonomian Provinsi Jawa Tengah, dimana sampai dengan tahun 2012 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah mencapai 36 juta rupiah. Jawa Tengah merupakan Provinsi peringkat kedua penghasil kedelai terbesar setelah Jawa Timur, dan merupakan sentra produksi kedelai di Indonesia. Sampai dengan tahun 2012 produksi kedelai di Jawa Tengah mencapai 152.416 ton dengan luas panen kedelai mencapai 97.112 per ha.

Kabupaten Grobogan adalah penghasil kedelai utama di Jawa Tengah. Setiawan (2013). Pengembangan usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kajian kebijakan, kriteria program, dan perumusan strategi yang komprehensif mengingat kegiatan usahatani kedelai akan melibatkan sub sistem-sub sistem yang ada didalamnya. Kebijakan pengembangan program usahatani kedelai yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain dianggap belum maksimal dan mampu meningkatkan kemampuan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah. Serangkaian kebijakan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan juga dirasa belum mampu menyentuh hingga level petani di tingkat bawah. Oleh sebab

itu dibutuhkan suatu strategi yang aplikatif sehingga dapat mendorong pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah yang berdampak kepada terwujudnya ketahanan pangan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan kriteria program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah yang berdampak kepada terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. Pengembangan sektor pertanian khususnya komoditas kedelai menjadi penting karena dalam rangka akselerasi pembangunan perdesaan maka sektor pertanian sebagai basis perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Winters et al (2010).

Beberapa definisi ketahanan pangan, antara lain dalam undang undang No : 7 tahun 1996 tentang pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Internasional Confrence in Nutrition (FAO/WHO, 1992), mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. World Food Summit 1996 dalam Paalberg (2009) memeperluas definisi diatas dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai dan budaya setempat. World Bank 1996, ketahanan pangan merupakan akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

Menurut Herlambang et al. (2002) produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output, kegiatan

tersebut dalam ekonomi dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Secara matematis fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut :
 $Q = f (K, L, X, E).....(1)$

Dimana Q mewakili output, K mewakili pengguna kapital, L mewakili pengguna tenaga kerja, X mewakili penggunaan bahan baku E mewakili keahlian kewirausahaan. Lipsey et al (1995) dalam Rodriguez-Claire (2008) menyatakan bahwa fungsi produksi sebagai hubungan antar input yang dipergunakan dalam proses produksi dengan kuantitas yang dihasilkan.

Sedangkan menurut Soekartawi (1999), fungsi produksi adalah hubungan fisik variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input, secara matematis hubungan itu dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, \dots, X_i, \dots, X_n)..... (2)$$

Berubahnya jumlah salah satu input dengan jumlah input lain yang tetap akan berpengaruh terhadap output. Perubahan output akibat perubahan jumlah salah satu input akan mengikuti hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (The Law of Deminishing Return) yang artinya setelah melewati suatu tingkat tertentu, peningkatan itu akan makin berkurang dan akhirnya mencapai titik negatif (Kartasapoetra,

1998). Hukum kenaikan hasil yang berkurang merupakan kaidah yang menunjukkan pola yang berlaku bagi perubahan marginal product (MP) dari suatu faktor produksi (Herlambang et al, 2002).

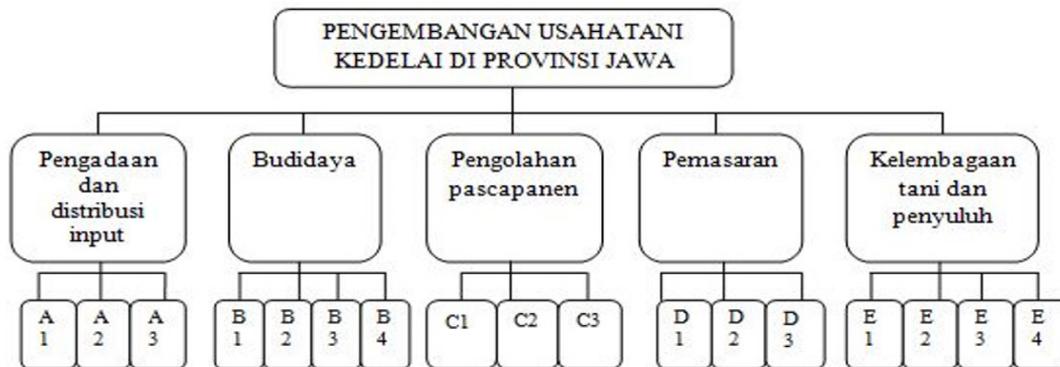
Marjinal product (MP) merupakan tambahan satu satuan input X yang dapat menyebabkan penambahan dan pengurangan satu satuan output Y. Marjinal product (MP) umumnya ditulis (Soekartawi, 1990). Dalam proses produksi tersebut setiap tipe reaksi produksi mempunyai nilai produk narjinal yang berbeda. Nilai produk marjinal berpengaruh besar terhadap elastisitas produksi diartikan sebagai presentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut :

$$Ep = \frac{\Delta Y}{Y} / \frac{\Delta X}{X} \text{ atau } \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y}.....(3)$$

Adapun ΔY adalah tambahan atau pengurangan output sedangkan ΔX adalah tambahan atau pengurangan satuan input. Sedangkan Y adalah output total dan X adalah input total.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP) dengan tujuan untuk mengetahui program manakah yang perlu didahulukan atau diprioritaskan dalam upaya mengembangkan usahatani kedelai. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan beberapa pihak yang dianggap berkompeten yang mewakili



Gambar 1. Kerangka Analysis Hierarchy Process (AHP)

untuk menentukan alternatif-alternatif program dalam upaya pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki dampak terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. Sampel keyperson dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang yang terdiri dari petani kedelai, pemerintah bidang pertanian, peneliti pertanian, akademisi, pengusaha pengguna kedelai, dan masyarakat.

Keterangan Gambar 1 :

- A₁ : Pemerintah memberikan subsidi input produksi sesuai kebutuhan petani
 A₂ : Pembukaan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam bidang pupuk dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar (tanpa subsidi)
 A₃ : Penyediaan sarana produksi pertanian (SAPROTAN) tepat waktu, jumlah, harga, dan mutu
 B₁ : Pendampingan kepada petani untuk menerapkan teknologi budidaya kedelai yang tepat
 B₂ : Merangsang peningkatan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati dalam kegiatan budidaya kedelai
 B₃ : Merangsang petani menggunakan benih kedelai berlabel
 B₄ : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya kedelai
 C₁ : Pemberian bantuan mesin pengering kepada kelompok tani
 C₂ : Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran petani melakukan penanganan pasca panen yang tepat
 C₃ : Pengendalian harga kedelai
 D₁ : Pembentukan kemitraan kelom-

pok tani dengan pedagang besar

D₂ : Pembentukan kemitraan kelompok tani dengan pabrik tahu atau pengguna kedelai lainnya secara langsung

D₃ : Pemberian bantuan modal kepada kelompok untuk pembelian kedelai

E₁ : Penyuluhan untuk penguatan kelembagaan petani

E₂ : Pemberian insentif bagi kelembagaan tani yang aktif

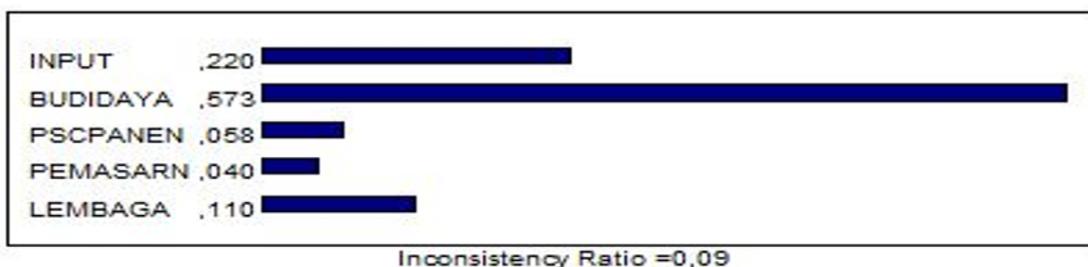
E₃ : Revitalisasi kelembagaan penyuluhan

E₄ : Memaksimalkan pemberdayaan kelembagaan petani

HASIL DAN PEMBAHASAN

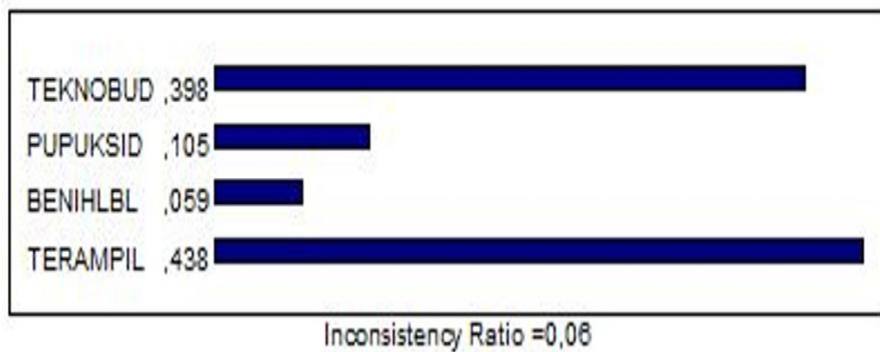
Sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan regional maupun nasional. Perannya mampu mendukung ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan mengerakan perekonomian regional serta nasional. Berdasarkan hasil analisis melalui Analisis Hierarchy Process (AHP) menunjukkan bahwa kriteria budidaya (nilai bobot 0,573) merupakan kriteria paling penting yang perlu diperhatikan dalam strategi pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah. Kriteria berikutnya adalah kriteria input (nilai bobot 0,220), kriteria lembaga (0,110), kriteria pasca panen (0,058), dan kriteria pemasaran (0,040).

Berdasarkan Gambar 2, terpilihnya kriteria budidaya sebagai prioritas utama mencerminkan bahwa pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah sangat erat kaitannya dengan masalah



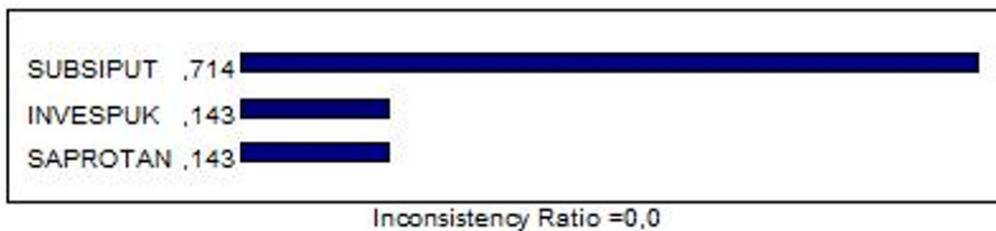
Gambar 2. Kriteria Pengembangan Usahatani Kedelai

Sumber: Data primer diolah



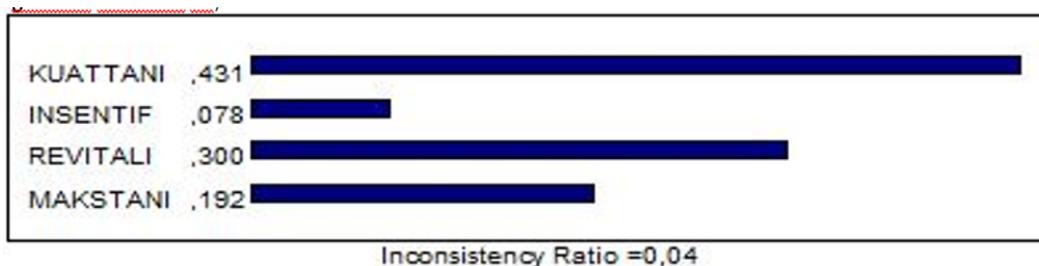
Gambar 3. Nilai Bobot Setiap Kriteria Aspek Budaya

Sumber: Data primer diolah



Gambar 4. Nilai Bobot Setiap Kriteria Aspek Input

Sumber: Data primer diolah



Gambar 5. Nilai Bobot Kriteria Aspek Kelembagaan Tani dan Penyuluh

Sumber: Data primer diolah

budidaya. Hal ini didasari melalui fakta dilapangan bahwa petani kedelai di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengetahuan yang rendah mengenai usahatani yang dikerjakannya. Seperti contoh petani kedelai sering kali tidak mengetahui informasi tentang jenis varietas yang dikembangkan, selain hal itu keterampilan petani untuk budidaya kedelai juga harus ditingkatkan sebab budidaya kedelai lebih sulit daripada budidaya lainnya.

Aspek yang di rumuskan dalam strategi pengembangan usahatani kedelai melalui kriteria budidaya dikemukakan dalam penelitian meliputi (A) pendampingan kepada petani untuk menerapkan teknologi budidaya kedelai yang tepat (TEKNOBUD); (B) Merangsang peningkatan penggunaan

pupuk organik dan pestisida nabati dalam kegiatan budidaya kedelai (PUPUKSID); (C) Merangsang petani menggunakan benih kedelai berlabel (BENIHLBL); (D) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya kedelai (TERAMPIL).

Dari keempat aspek tersebut berdasarkan gambar 3, yang dipandang utama oleh para key person adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya kedelai (nilai bobot 0,438). Secara implisit terpilihnya aspek ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam kriteria budidaya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan budidaya kedelai. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya.

Aspek selanjutnya yang terpilih dalam kriteria budidaya adalah pendampingan kepada petani untuk menerapkan teknologi budidaya kedelai yang tepat (nilai bobot 0,389). Hal ini berkaitan dengan di butuhnya teknologi budidaya seperti penggunaan mesin maupun alat yang dapat meningkatkan hasil panen kedelai para petani. Kemudian aspek penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati (nilai bobot 0,105), hal ini berkaitan dengan pertanian yang ramah lingkungan serta terwujudnya hasil pertanian kedelai yang aman dan sehat untuk konsumen yang mengkonsumsi produk pertanian kedelai.

Aspek yang terakhir dipilih key person adalah penggunaan benih kedelai berlabel (nilai bobot 0,059) aspek ini justru memiliki nilai bobot paling rendah. Hal ini disadari oleh fakta dilapangan selama ini penggunaan kedelai berlabel dengan kedelai non label sama-sama menghasilkan kedelai yang bermutu, akan tetapi para petani lebih memilih kedelai non label. Hal ini disebabkan kalau ingin menggunakan kedelai berlabel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh bibitnya karena bibit kedelai tersebut harus di uji dan di verifikasi.

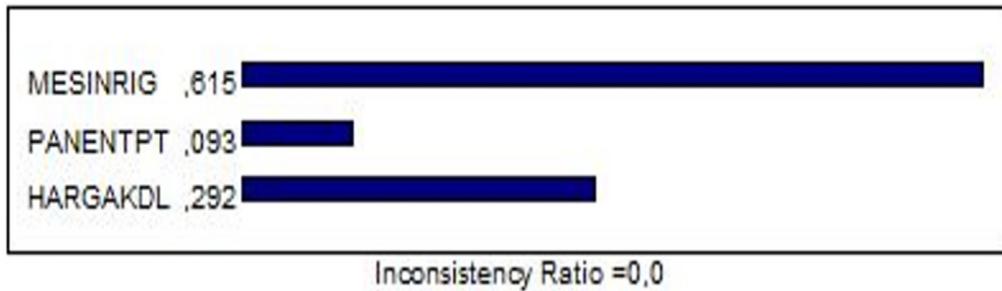
Kriteria kedua yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah adalah kriteria pengadaan dan distribusi input. Nilai bobot dari kriteria pengadaan dan distribusi input dapat dilihat pada gambar 4 Kriteria yang dirumuskan dalam strategi pengembangan usahatani kedelai melalui pengadaan dan distribusi input meliputi aspek : (A) Pemberian subsidi input produksi sesuai kebutuhan petani (SUBSIPUT); (B) Pembukaan kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam bidang pupuk dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar tanpa subsidi (INVEPUK); (C) Penyediaan sarana produksi pertanian tepat waktu, jumlah, harga, dan mutu (SAPROTAN).

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa aspek pemberian subsidi input produksi sesuai kebutuhan petani (nilai bobot 0,714) menjadi prioritas utama yang

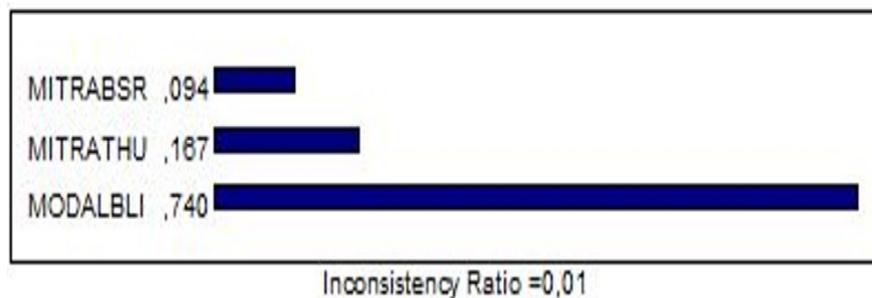
dipilih key person untuk mengembangkan usahatani kedelai. Pemberian subsidi pupuk terkadang dilakukan secara parsial menyebabkan timbulnya *exces demand*. Suplai pupuk bersubsidi dalam jumlah yang kecil mendorong timbulnya pasar gelap, jadi menurut responden aspek pemberian subsidi input produksi seperti subsidi pupuk perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Kriteria ketiga yang perlu diperhatikan dalam strategi pengembangan usahatani kedelai adalah kriteria kelembagaan tani dan penyuluh. Aspek untuk mencapai target pengembangan usahatani kedelai menurut key person dapat dicapai melalui : (A) Penyuluhan untuk penguatan kelembagaan petani (KUATTANI); (B) Pemberian insentif bagi kelembagaan tani yang aktif (INSENTIF); (C) Revitalisasi kelembagaan penyuluhan (REVITALI); (D) Memaksimalkan pemberdayaan kelembagaan petani (MAKSTANI). Nilai bobot alternatif dalam kriteria kelembagaan tani dan penyuluh dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa aspek penyuluhan untuk penguatan kelembagaan petani (nilai bobot 0,431) dalam kriteria kelembagaan tani dan penyuluh menjadi prioritas yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Penguatan kelembagaan petani dilakukan melalui forum pertemuan antara kelompok tani dengan dinas maupun lembaga swasta yang memiliki peran dalam pengembangan usahatani kedelai. Kriteria keempat yang perlu diperhatikan dalam strategi pengembangan usahatani kedelai adalah kriteria pasca panen. Aspek yang dikemukakan oleh key person untuk mencapai kriteria pengembangan usahatani kedelai dalam kriteria pasca panen meliputi : (A) Pemberian bantuan mesin pengering kepada kelompok tani (MESINRIG); (B) Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran petani melakukan penanganan pasca panen yang tepat (PANENTPT); (C) Pengendalian harga kedelai (HARGAKDL). Nilai bobot alternatif dalam kriteria pasca panen dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Nilai Bobot Kriteria Aspek Pasca Panen
 Sumber: Data primer diolah



Gambar 7. Nilai Bobot Setiap Kriteria dalam Aspek Pemasaran
 Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa kriteria pasca panen dalam aspek pemberian bantuan mesin pengering kepada kelompok tani (nilai bobot 0,615) menjadi prioritas utama hal ini sesuai dengan fakta dilapangan. Fakta menunjukkan rusaknya hasil panen dikarenakan kurangnya bantuan mesin pengering pada saat curah hujan yang sangat tinggi. Bantuan mesin pengering mutlak diperlukan untuk meminimalkan tingkat kehilangan hasil dan mempertahankan kualitas hasil panen biji kedelai. Kriteria kelima yang perlu diperhatikan dalam strategi pengembangan usahatani kedelai adalah kriteria pemasaran. Aspek yang dikemukakan oleh key person untu mencapai pengembangan usahatani kedelai melalui kriteria pemasaran meliputi :

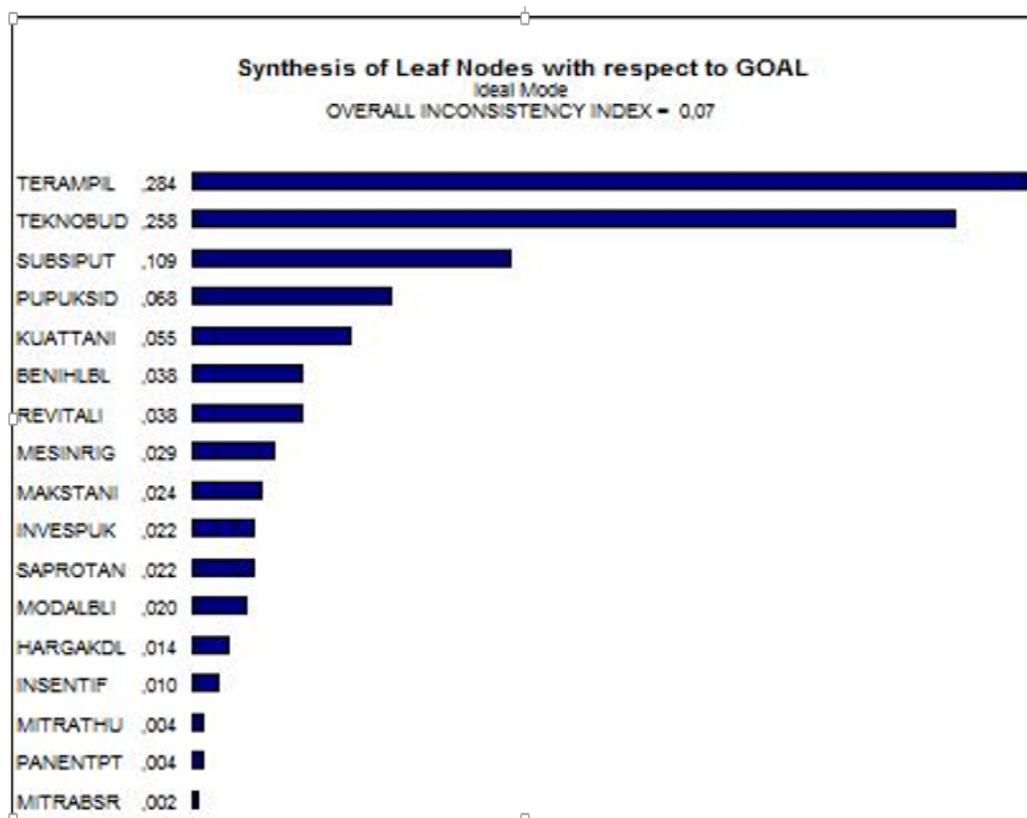
- (A) Pembentukan kemitraan kelompok tani dengan pedagang besar (MIRABSR);
- (B) Pembentukan kemitraan kelompok tani dengan pabrik tahu atau pengguna kedelai lainnya secara langsung (MITRATHU);
- (C) Pemberian bantuan modal kepada kelompok untuk pembelian kedelai.

Berdasarkan Gambar 7 diketahui bahwa kriteria pemasaran dalam aspek bantu-

an permodalan bagi kelompok tani untuk pembelian kedelai (nilai bobot 0,740) menjadi prioritas utama. Bantuan modal untuk pembelian kedelai dimaksudkan untuk mengurangi rantai pemasaran yang terlalu panjang dari petani sampai dengan konsumen. Melalui fasilitas bantuan permodalan kelompok ini diharapkan kelompok tani dapat membeli biji kedelai, sehingga petani tidak menjual kedelai secara perorangan kepada pedagang besar atau industri pengolahan kedelai. Hal ini diharapkan dapat menaikkan posisi tawar petani dalam hal pemasaran biji kedelai.

Hasil analisis secara keseluruhan (overall) terlihat pada gambar 8 menunjukkan keseluruhan nilai bobot kriteria dalam strategi pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah dengan analisis Analysis Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa aspek terpilih dalam pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah segera untuk dilaksanakan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya kedelai.

Berdasarkan analisis AHP di atas



Gambar 8. Keseluruhan Nilai Bobot Kriteria

secara keseluruhan maka diketahui bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya kedelai menjadi elemen terpenting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun teknologi budidaya dan pemberian subsidi kepada petani berturut-turut menjadi elemen terpenting ke dua dan ke tiga. Sedangkan pembentukan kemitraan menjadi hal yang paling tidak prioritas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

SIMPULAN

Penelitian tentang pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang dilakukan terhadap 12 key person yang terdiri dari unsur petani kedelai, pemerintah bidang pertanian, peneliti pertanian, akademisi, pengusaha pengguna kedelai, dan masyarakat. Mempergunakan bantuan alat analisis Analisis Hirerarki Proses (AHP). Memberikan kesimpulan bahwa

pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah tersusun atas beberapa kriteria program yang di prioritaskan dalam pembentukannya yaitu pertama kriteria budidaya (nilai bobot 0,537), kedua kriteria input (nilai bobot 0,220), ketiga kriteria lembaga (nilai bobot 0,110), keempat kriteria pasca panen (nilai bobot 0,058), dan kelima kriteria pemasaran (nilai bobot 0,040).

Hasil analisis melalui AHP terpilihnya kriteria budidaya sebagai prioritas utama mencerminkan bahwa pengembangan usahatani kedelai di Provinsi Jawa Tengah sangat erat kaitannya dengan masalah budidaya. Hal ini didasari melalui fakta dilapangan bahwa petani kedelai di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengetahuan yang rendah mengenai usahatani yang dikerjakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2013). *Produksi Impor Ekspor dan Kebutuhan Dalam Negeri Terhadap Kedelai Tahun 2006-2012*. Jakarta : BPS.

- Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik Indonesia Dalam Angka, BPS. Jakarta.
- Baliwati, Et al. (2004). Pengantar Pangan dan Gizi. Cetakan 1. Jakarta : Penebar Swadaya.
- FAO/WHO. (1992). Paper Presented at International Conference on Nutrition Goals : World Declaration and Plan of Action Rome/Genewa : FAO/WHO.
- Hussain, Muhammad F et al. (2009). Economic of Sugarcane Production in Pakistan: A Price Risk Analysis. International Research Journal of Finance and Economics, Vol 4:2006
- Herlambang, Tedy. et al. (2002). Ekonomi Mikro : Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pertanian. (2010). Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, Jakarta.
- Paarlberg, RL. (2009). Governance and Food Security in an Age of Globalization. Food Agriculture and the Environment Discussion paper 36. IFPRI: Washington DC
- Rodriguez-Claire, Andres. (2008). Cluster and Comparative Advantage: Implication for Industrial Policy. Journal of Economics Development. 82 (2008): 43-57
- Saaty, Thomas L. (1993). Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Terjemahan : Liana Setiono. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Saaty, Thomas L., and Niemira, Michael P. (2006). A Framework For Making a Better Decision How to Make More Effective Site Selection, Store Closing and Other Real Estate Decision. Research Review Vol 13, No 1, 2006.
- Setiawan, Avi Budi. (2013). Efisiensi Teknis, Alokatif dan Ekonomi Budidaya Padi. Jurnal Jejak Vol 6(2).
- Soekartawi. (1999). Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian : Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Jakarta.
- Winters, Paul et al. (2010). Rural Income Generation Activities in Developing Countries: A Multi Country Analysis. Rome: FAO Working Paper: World Bank. (1996) . Indonesia Impact Evaluation Report : Enhancing the Quality of Life in Urban Indonesia : The Legacy of Kampung Improvement Program. Washington D.C: The World Bank.